

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan penambahan output atau penambahan pendapatan nasional dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun. Menurut Boediono (1992 : 28) pertumbuhan ekonomi merupakan perluasan kegiatan ekonomi dan menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara menurut Sukirno, (1994 : 33) Pertumbuhan Ekonomi merupakan kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang (dari tahu ke tahun). Sehingga untuk dapat mengetahui harus diadakan perbandingan pendapatan dari tahun ke tahun yang kenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan digambarkan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, walaupun masih adanya indikator lain seperti distribusi pendapatan. Proses pertumbuhan ekonomi secara bersamaan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupuk modal, mendorong kemajuan teknologi,

meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar. Maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat pesat.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan menurut BPS PDRB merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, disamping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, tabel input-output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah.

Dalam perhitungannya sendiri PDRB memiliki dua macam harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). ADBH sendiri menggunakan harga berlaku yang masih terpengaruh oleh besaran inflasi dalam menghitung nilai aktivitas ekonomi sedangkan ADHK menggunakan harga konstan yang biasanya ditetapkan tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga harga-harga yang berlaku pada tahun setelahnya disesuaikan terlebih dahulu dengan tahun dasar dengan menghilangkan pengaruh inflasi dari harga tersebut pada tahun perhitungan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Priambodo, 2014 :4). Dalam UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan dengan konsep kesenjangan fiskal (Fiscal gap) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya adalah pembiayaan melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah Sesuai Dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

a) Pajak Daerah

Jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dll.

b) Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c) Hasil pengelolaan Kekayaan milik Daerah yang dipisahkan

Merupakan bagian dari PAD yang bersumber dari : bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada usaha lainnya.

d) Lain-lain PAD yang sah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana perimbangan yang merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 tahun 2004). Kegiatan khusus yang mengarah pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik sebagai penunjang. Dengan adanya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

DAK yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan pembangunan daerah. DAK memiliki karakter yang paling spesifik diantara dana transfer lainnya dimana DAK hanya dapat digunakan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Departemen teknis yang terkait dengan bidang DAK.

Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.

Pentingnya DAK bagi suatu daerah maka dapat dikatakan bahwa, semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima suatu daerah akan berdampak besar pada peningkatan infrastruktur pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini berdampak kepada barang dan jasa yang dihasilkan daerah yang akan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

PP No.55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan guna mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Marianus, *et. al.* 2016).

Mardiasmo (2006) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu: a) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geo-graphical equity*); b) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*); c) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif; dan d) Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pengalokasian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Dimana daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang relative lebih rendah agar dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam era otonomi.

Sebagaimana tujuan dan fungsi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pemerataan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah, mengingat DAU sendiri yang merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Yang pertama yaitu Kebutuhan Daerah dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah, seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan Produk domestik regional bruto (PDRB).

5. Belanja Modal

Kendali pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi terletak pada anggaran negara yang memuat jumlah dan tujuan anggaran tersebut digunakan. Salah satu anggaran negara tersebut adalah Belanja Modal. Belanja modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (PP Nomor 71/2010). Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Semakin tinggi rasio belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut (BPS, 2015).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti :

1. Belanja modal tanah yaitu seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan 20 kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Belanja modal gedung dan bangunan yaitu Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

(kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yaitu Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
6. Belanja modal lainnya yaitu Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

7. Belanja modal badan layanan umum (BLU) yaitu Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Investasi melalui belanja modal diharapkan mampu menimbulkan dampak yang lebih besar dan dalam jangka panjang yang akan berdampak langsung terhadap pembangunan suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1. Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja yang merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk negara dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Perluasan penyerapan tenaga kerja yang harusnya menjadi perhatian yang sangat penting bagi pemerintah, karena adanya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut BPS penduduk berumur lima belas tahun keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja apabila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Jumlah seluruh penduduk dalam

suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi setelah pertumbuhan Penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang semakin banyak berarti akan menambah juga tenaga kerja produktif. Jika produktivitas meningkat maka akan meningkatkan pula pendapatan daerah dan pastinya akan mensejahterakan masyarakat, yang juga diikuti dengan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang dilakukan sangat berguna bagi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Beberapa penelitian terdahulu yang mengacu pada penelitian ini yaitu:

1. Barimbing, *et. al.* (2015) meneliti pengaruh PAD, Tenaga Kerja dan Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tenaga kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi Bali periode tahun 2008-2012. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi non partisipasian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara peneliti sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Siagian, *et. al.* (2018) meneliti pengaruh PAD, DAU, DAK pada Pertumbuhan ekonomi dengan. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Populasi dalam penelitian ini merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Priambodo (2014) meneliti pengaruh PAD, Belanja Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, dan tenaga kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel model atas efek tetap dengan metode Generalized Least Square (GLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Tenaga

kerja berpengaruh positif sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Widyasari (2013) meneliti Pengaruh PAD, BDH, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan DAK. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Permanasari (2013) meneliti Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan

PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah setiap daerah berbeda-beda. Bagi daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak memiliki industri dan kekayaan alam. Karena itu terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah tersebut, sebab semakin tinggi PAD maka akan semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus atau biasa disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, yang khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai dan juga berdampak langsung terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap daerah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam daerahnya masing masing, namun masih ada sebagian daerah yang masih bergantung terhadap dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. Adanya DAU merupakan upaya dari pemerintah pusat sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang disebabkan oleh minimnya pajak dan potensi alam yang berbeda setiap daerah.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memneri manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana public sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga belanja modal yang besar akan memberikan pelayanan public yang lebih baik dan daerah semakin memiliki kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian. Secara tidal langsung hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan perkapita dan meningkatnya barang dan jasa hasil aktivitas ekonomi yang diikuti juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

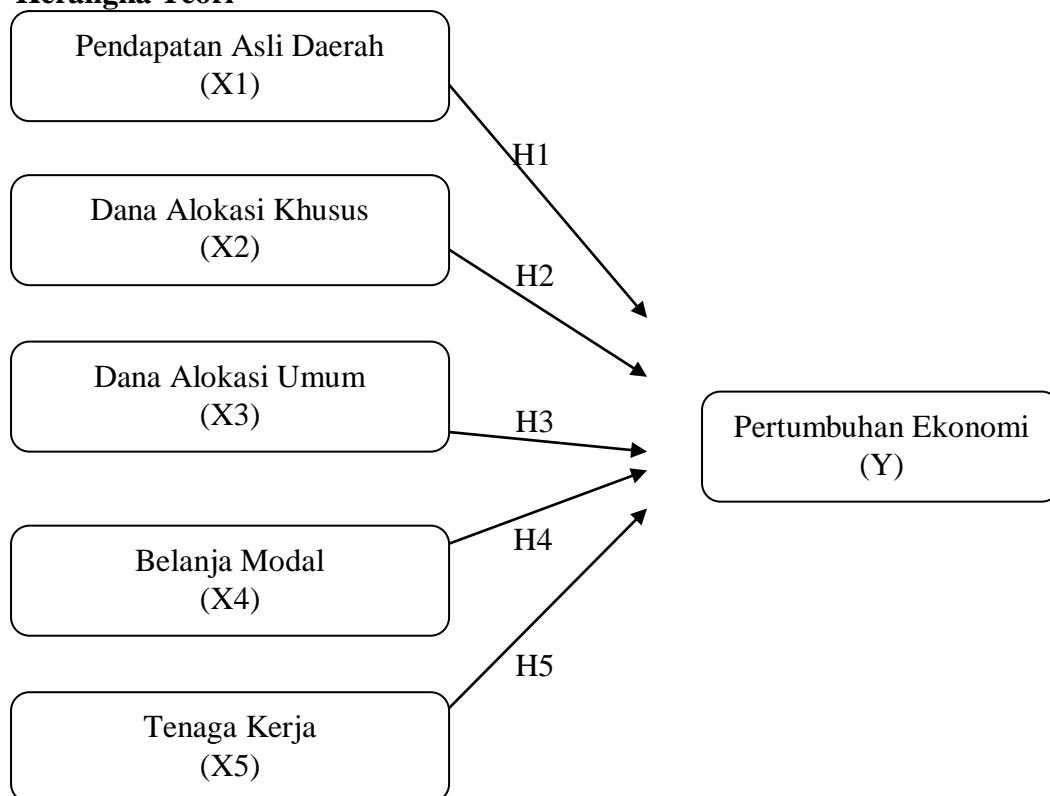
5. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan

Adanya peningkatan tenaga kerja yang diikuti dengan peningkatan output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Adanya peningkatan tenaga kerja memungkinkan untuk suatu

daerah menambah produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. berikut ini kerangka teori yang menunjukkan model penelitian:

Kerangka Teori



D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan hipotesis penelitian yang dilengkapi oleh argument yang mendasari penentuan hipotesis. Adapun Hipotesis berdasarkan hubungan antar variabel yaitu:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu sumber pendanaan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kemandirian daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat semakin berkurang, PAD diharapkan mampu menjadi pencipta sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, secara tidak langsung terjadi pula peningkatan jumlah output barang dan / jasa pada daerah yang bersangkutan, tidak hanya itu meningkatnya jumlah uang yang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya mendorong peningkatan nilai PDRB.

Penelitian mengenai hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan oleh Barimbing, *et. al.* (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan dari uraian diatas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesisi yang diajukan adalah :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengalokasian DAK yang cenderung mengarah kepada penambahan aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar yang berupa sarana dan prasarana serta infrastruktur yang nantinya akan

menjadi modal bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Penelitian mengenai hubungan variabel DAK terhadap Pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan oleh Widyasari (2013), dalam penelitiannya mengatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan dari uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya desentralisasi membuat pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah mengatur daerahnya sendiri. Anggaran untuk pelaksana tugas dan fungsi tersebut berasal dari PAD, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU lebih mengarah kepada peran pusat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga pada akhirnya memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

Penelitian mengenai hubungan variabel Dana Alokasi Khusus (DAU) antara lain dilakukan oleh *Dwirandra, et. al.* (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagaian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Prima Rosita, 2016).

Pada penelitian Rosita (2016) belanja modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah :

H4 : Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

5. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Peningkatan tenaga kerja yang diimbangi dengan peningkatan output yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada penelitian Barimbing, *et. al.* (2015) Tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh Priambodo (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5 : Tenaga Kerja Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.